



BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 292 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01)
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016–2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 8);
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Purbalingga sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyusun Perjanjian kinerja dan Rencana Aksi Kinerja serta laporan kinerja dan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 - 2021.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan Bupati ini maka Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 060/ 191 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Purbalingga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 2 September 2019

BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
2. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga.

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
 NOMOR 292 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH  
 KABUPATEN PURBALINGGA

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Misi 1 : Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efisien, efektif, bersih dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat.

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih ( <i>good governance and clean governance</i> )	Indeks Reformasi Birokrasi	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang efektif, transparan dan akuntabel	Opini Audit Keuangan BPK	Opini	Hasil Audit BPK	Laporan Hasil Audit
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	Kategori Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Kategori	LHE Kemenpan RB	Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
			Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	Hasil Penilaian BPKP	Laporan Hasil Penilaian Maturitas SPIP
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten	Indeks	Hasil pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat	Dokumen IKM

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
			Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	Hasil Pemingkatan Keterbukaan Badan Publik KIP Prov Jawa Tengah	Laporan hasil pemingkatan keterbukaan Badan Publik KIP Prov Jawa Tengah
		Meningkatnya efisiensi kelembagaan dengan penggunaan TI dan sistem manajemen sumber daya aparatur yang baik	Indeks SPBE	Indeks	Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Laporan Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
			Indeks Profesionalitas ASN	Angka	Hasil pengukuran Indeks Profesional ASN dari BKN	Buku Indeks Profesional ASN dari BKN

Misi 2 : Mendorong kehidupan masyarakat yang religius yang beriman dan bertakwa ke hadirat Allah SWT serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan rasa aman dan tenteram dalam masyarakat yang berdasar pada realitas kebhinekaan

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Terwujudnya ketentraman, ketertiban, rasa aman dan paham wawasan kebangsaan	Persentase penurunan konflik dan SARA	Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan Keamanan dalam masyarakat.	Angka Pelanggaran Ketertiban Umum per 10.000 penduduk	Angka	$\frac{\text{Jumlah Pelanggaran Ketertiban Umum}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 10,000$	SATPOL PP
			Angka Kriminalitas	Angka	$\frac{\text{Jumlah Kriminalitas}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 10,000$	SATPOL PP
			Indeks Toleransi	Angka	Nilai rata-rata potensi konflik	Kesbangpol

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
dalam masyarakat		Meningkatnya ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana	Indeks ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana	Persen	$\frac{\text{Jumlah desa dan kelurahan tanggap bencana}}{\text{jumlah desa dan kelurahan rawan bencana}} \times 100$	IRBI dari BNPB
		Meningkatnya Paham dan wawasan Kebangsaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum (Pemilukada, Pemilu, Pilpres)	Persen	$\frac{\text{Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih}}{\text{Jumlah DPT}} \times 100$	Dokumen KPU

Misi 3 : Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok manusia utamanya Pangan dan Papan secara layak

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Meningkatnya Kualitas Hidup Penduduk Miskin	Angka Kemiskinan	Meningkatnya status pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Angka / nilai	$\% \text{ AKG} \times \text{Bobot masing-masing kelompok pangan}$	Profil Pangan
		Meningkatnya Ketersediaan dan kepemilikan Rumah Layak Huni	Persentase Rumah Layak Huni	persen	$\frac{\text{Jumlah Rumah Layak Huni}}{\text{Jumlah Rumah}} \times 100$	Data RTLH

Misi 4 : Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA (dari dokumen)
Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Meningkatnya Kualitas dan Tingkat Pendidikan Masyarakat	Rata – Rata Lama Sekolah	Tahun	$RLS = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \text{lama sekolah penduduk}_i$	Release BPS
		Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	$y = L + \frac{U}{1 + be^{at}}$	Release BPS
		Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Cakupan Keluarga Sejahtera	Pesen	$\frac{\text{Jumlah keluarga sejahtera}}{\text{jumlah keluarga}} \times 100$	Dinsosdalduk KB P3A

Misi 5 : Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpel – simpel perekonomian utamanya industri pengolahan manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata, industri kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja.

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Meningkatnya Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Masyarakat	Pertumbuhan Ekonomi	Menurunnya pengangguran terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	% (Persen)	$\frac{\text{Jumlah pengangguran}}{\text{Jumlah angkatan kerja}} \times 100\%$	BPS
		Meningkatnya Realisasi Investasi	Realisasi Nilai Investasi Baru	Rupiah	Nilai investasi baru di Kabupaten Purbalingga	DPMPPTSP
		Meningkatnya Pendapatan dari Sektor Pariwisata	Pendapatan Daerah dari sektor pariwisata	Rupiah (dalam ribuan)	Perhitungan Pendapatan dari sektor pariwisata	Laporan kunjungan wisatawan

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
	PDRB Per kapita	Meningkatnya Kemandirian dan Daya Saing Koperasi dan Usaha Kecil Mikro	Pertumbuhan PDRB Sektor Sekunder	Persen	Release BPS	BPS
		Meningkatnya Daya Saing Industri dan Pelayanan Perdagangan	Pertumbuhan PDRB Sektor Primer	Pesen	Release BPS	BPS

Misi 6 : Mewujudkan kawasan perkotaan dan perdesaan yang sehat dan menarik untuk melakukan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya melalui gerakan masyarakat, yang didukung dengan penyediaan insfrastruktur/ sarana prasarana kewilayahan yang memadai

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Handal dan Penyelenggaraan Penataan Ruang yang Aman Produktif dan Berkelanjutan	Indeks Daya Saing Infrastruktur	Meningkatnya Daya Saing Infrastruktur	Indeks Daya Saing Infrastruktur	nilai	$\frac{\% \text{ Jalan Kondisi Mantap} + \% \text{ luas daerah oncoran air irigasi} + \% \text{ luas wilayah tidak kumuh (tersedianya air bersih, tersedia sanitasi, tersedia jaringan listrik)}}{3}$	DPU - PR
Meningkatnya keberdayaan masyarakat dan kualitas pelayanan desa	Indeks Desa Membangun (IDM)	Meningkatnya kualitas pemerintahan desa dan kelembagaan masyarakat desa	Persentase Desa Swasembada	Persen	$\frac{\text{Desa Swasembada}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100$	Profil desa



Misi 7 : Mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Terpeliharanya Kualitas Lingkungan Hidup dan Keragaman Hayati	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Terkendalinya pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	IKLH KAB = 30% IKA + 30% IKU + 40% IKTL	DLH

BUPATI PURBALINGGA,  
  
 DYAH HAYUNING PRATIWI

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
 NOMOR 292 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH  
 KABUPATEN PURBALINGGA

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

1. SEKRETARIAT DAERAH

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	Kategori Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan pemerintah daerah	Rata-rata Capaian Target Kinerja Sasaran Pembangunan Daerah	Persen	Rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran OPD
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan perangkat daerah terhadap pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	Persen	Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik

2. SEKRETARIAT DPRD

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN
Meningkatnya kualitas pelayanan fasilitas kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	Indeks Kepuasan fasilitas pelayanan tugas dan fungsi DPRD	Meningkatkan kualitas pelayanan kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	Persentase usulan Raperda yang disetujui	Persen	$\frac{\text{Jumlah Raperda yang disetujui}}{\text{Jumlah Usulan Raperda}} \times 100$

3. INSPEKTORAT DAERAH

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN
Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Pemerintah Daerah	Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Level Kapabilitas Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP)	Level	<i>Hasil QA BPKP</i>
			Persentase Tindaklanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (TLHP)	Persen	$\frac{\text{Temuan yang ditindaklanjuti}}{\text{jumlah temuan}} \times 100$
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Daerah	Persen	$\frac{\text{Jumlah OPD predikat baik}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100$	

4. BAPPELITBANGDA

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN
Mewujudkan kapasitas Perencanaan Daerah yang efektif, transparan dan akuntabel	Nilai AKIP komponen perencanaan	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian	Tingkat keselarasan dokumen RKPD terhadap RPJMD	persen	$\frac{\sum_{i=1}^6 Ki}{6}$ Ki = rata-rata keselarasan RKPD terhadap RPJMD atas program, indikator program, target program, sasaran, indikator sasaran dan target sasaran
			Rata-rata capaian target kinerja program pembangunan daerah	persen	$\frac{\sum_{i=1}^n Ki}{n}$ Ki = capaian indikator kinerja program 1 sampai dengan n yang ada di RKPD n = banyaknya indikator kinerja program
Mewujudkan kapasitas lembaga kelitbangan daerah yang berkualitas	Inventor purbalingga masuk dalam nominator krenova tingkat provinsi	Meningkatnya kualitas kelitbangan	Persentase rekomendasi kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	Persen	$\frac{\text{Rekomendasi kebijakan inovasi yang diterapkan}}{\text{Rekomendasi kebijakan inovasi yang diusulkan}} \times 100$

5. BAKEUDA

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN
Mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang efektif, transparan dan akuntabel	Opini Audit Keuangan BPK	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang efektif, transparan dan akuntabel	Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kategori	<i>Penyampaian Laporan Keuangan kabupaten Purbalingga sebelum 31 Maret</i>

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN
			Persentase Aset Daerah yang Terdata dengan Baik	Persen	$\frac{\text{Jumlah OPD yang Asetnya terdata dengan baik}}{\text{Jumlah seluruh OPD}} \times 100$
			Tingkat keselarasan APBD terhadap RKPD	Persen	$\frac{\text{Jumlah program dan kegiatan dalam APBD}}{\text{Jumlah program dan kegiatan dalam RKPD}} \times 100$

6. BKPPD

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN
Meningkatnya Efisiensi Kelembagaan dan Sistem Manajemen Sumber Daya Aparatur	Indeks Profesionalisme ASN	Meningkatnya Kompetensi dan Profesionalisme SDM Aparatur	Persentase Penempatan ASN sesuai Formasi dan Kompetensi	Persen	$\frac{\text{Penempatan ASN sesuai Formasi dan Kompetensi}}{\text{Jumlah ASN}} \times 100$
			Persentase ASN yang lulus pengembangan kompetensi sesuai dengan jabatannya	Persen	$\frac{\text{ASN yang lulus pengembangan kompetensi}}{\text{ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi}} \times 100$
		Meningkatnya kinerja ASN	Rata-Rata Nilai SKP ASN	Nilai	$\frac{\text{Nilai SKP ASN}}{\text{Jumlah ASN}}$

7. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN
Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	Rata-Rata Lama Sekolah	Meningkatnya Akses Pelayanan Pendidikan	APK PAUD	Persen	$\frac{\text{Jumlah peserta didik PAUD}}{\text{Jumlah penduduk usia 3 – 6 tahun}} \times 100$
	Harapan lama sekolah		APK SD sederajat	Persen	$\frac{\text{Jumlah peserta didik di SD/sederajat}}{\text{Jumlah penduduk usia 7 – 12 tahun}} \times 100$
			APK SMP sederajat	Persen	$\frac{\text{Jumlah peserta didik di SMP/sederajat}}{\text{Jumlah penduduk usia 13 – 15 tahun}} \times 100$
			APM SD/ Sederajat	Persen	$\frac{\text{Jumlah peserta didik di SD atau sederajat usia 7 – 12 tahun}}{\text{Jumlah penduduk usia 7 – 12 tahun}} \times 100$
			APM SMP/ Sederajat	Persen	$\frac{\text{Jumlah peserta didik di SMP atau sederajat usia 13 – 15 tahun}}{\text{Jumlah penduduk usia 13 – 15 tahun}} \times 100$
			Rasio Ruang SD/ Sederajat	Persen	$\frac{\text{Jumlah Siswa SD}}{\text{Jumlah Ruang SD}} \times 100$
			Rasio Ruang SMP/ Sederajat	Persen	$\frac{\text{Jumlah Siswa SMP}}{\text{Jumlah Ruang SMP}} \times 100$
			Rasio Guru SD/ Sederajat	Persen	$\frac{\text{Jumlah Siswa SD}}{\text{Jumlah Guru SD}} \times 100$
			Rasio Guru SMP/ Sederajat	Persen	$\frac{\text{Jumlah Siswa SMP}}{\text{Jumlah Guru SMP}} \times 100$
			Persentase PAUD Berakreditasi A	Persen	$\frac{\text{Jumlah sekolah PAUD Akreditasi A}}{\text{Jumlah sekolah PAUD}} \times 100$

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN
			persentase SD Berakreditasi A	Persen	$\frac{\text{Jumlah sekolah SD Akreditasi A}}{\text{Jumlah sekolah SD}} \times 100$
			persentase SMP Berakreditasi A	Persen	$\frac{\text{Jumlah sekolah SMP Akreditasi A}}{\text{Jumlah sekolah SMP}} \times 100$
Melestarikan seni budaya daerah	Indeks kebudayaan	Meningkatnya apresiasi terhadap budaya daerah dan pelestarian budaya	Cakupan pembinaan objek kebudayaan	Persen	$\frac{\text{Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dibina}}{\text{jumlah obyek pemajuan kebudayaan}} \times 100$
			Cakupan pelestarian cagar budaya	Persen	$\frac{\text{Jumlah benda, bangunan, struktur, situs dan Kawasan cagar budaya yang dilestarikan}}{\text{jumlah seluruh benda, bangunan, struktur, situs dan Kawasan cagar budaya}} \times 100$

#### 8. DINAS KESEHATAN

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI)	0/00.000 per 100.000 KH	$\frac{\text{Jumlah kematian ibu dalam tahap kehamilan atau kelahiran dalam periode satu tahun}}{\text{Jumlah kelahiran hidup dalam periode satu tahun}} \times 100.000$

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN
			Angka Kematian Bayi (AKB)	0/.000 KH per 1000 KH	$\frac{\text{Jumlah kematian bayi usia kurang dari 1 tahun dalam periode satu tahun}}{\text{Jumlah kelahiran hidup dalam periode satu tahun}} \times 1.000$
			Angka Kematian Balita (AKABA)	0/.000 KH per 1000 KH	$\frac{\text{Jumlah kematian balita usia 0 – 5 tahun}}{\text{Jumlah balita}} \times 1.000$
			Prevalensi Balita gizi buruk	Persen	$\frac{\text{Jumlah balita gizi buruk}}{\text{Jumlah seluruh balita}} \times 100$
			Cakupan Kinerja pencegahan dan pengendalian penyakit menular	Persen	$\frac{\text{Capaian kinerja program TB \& HIV / AIDS}}{2} \times 100$
			Cakupan Kinerja pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan Kesehatan Jiwa	Persen	$\frac{\text{Capaian kinerja program Hipertensi, DM, ODGJ}}{3} \times 100$

9. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN
Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum	Indeks jalan mantap	Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan	Persentase Jalan kondisi Baik	Persen	$\frac{\text{Panjang jalan dalam kondisi baik}}{\text{Jumlah panjang jalan}} \times 100$



TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN
yang Handal dan Penyelenggaraan Penataan Ruang yang aman, nyaman produktif dan berkelanjutan			Persentase Jembatan kondisi Baik	Persen	$\frac{\text{Panjang Jembatan dalam kondisi baik}}{\text{Jumlah Panjang Jembatan}} \times 100$
	Indeks air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi (SPM)	Meningkatnya kualitas bangunan Irigasi	Persentase Luas oncoran air irigasi	Persen	$\frac{\text{Jumlah debit andalan dibendung}}{\text{Jumlah area irigasi} \times 1.25 \frac{l}{\text{detik/ha}}} \times 100$
	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	Terkendalinya Pemanfaatan Ruang sesuai peruntukan	Persentase pertimbangan teknis Pemanfaatan Ruang sesuai peruntukan	Persen	$\frac{\text{Jumlah rekomendasi sesuai peruntukannya}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diusulkan}} \times 100$
		Meningkatnya kualitas bangunan gedung pemerintah	Cakupan Bangunan Gedung Pemerintah Laik Fungsi	Persen	$\frac{\text{Jumlah gedung pemerintah laik fungsi}}{\text{Jumlah bangunan gedung pemerintah}} \times 100$

10. DINSOSDALDUKKBP3A

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN
Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Cakupan Keluarga Sejahtera	Meningkatnya penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persentase PMKS yang terlayani	%	$\frac{\text{Jumlah PMKS yang terlayani}}{\text{Jumlah seluruh PMKS}} \times 100$
		Meningkatnya partisipasi Keluarga Berencana	Rata - Rata Angka Kelahiran Total / TFR	Per 1000 wanita	$TFR = 5 \sum_{i=15-19}^{45-49} ASFR_i$

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN
		Tertanganinya permasalahan perempuan dan anak	Indek Pemberdayaan Gander (IDG)	Persen	$\frac{IPAR + IDM + LIN - DIST}{3}$ <p>IPAR = Indeks keterwakilan di parlemen  IDM = Indeks pengambilan keputusan  LIN-DIST = indeks distribusi pendapatan</p>
			Nilai Kabupaten Layak Anak	Nilai	Laporan Hasil Penilaian Kementerian PPPA

#### 11. DINRUMKIM

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN
Meningkatnya Ketersediaan dan kepemilikan Rumah Layak Huni	Persentase Rumah Layak Huni	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni	Rumah Tidak Layak Huni yang ditangani	Persen	$\frac{\text{Jumlah rumah tidak layak huni yang ditangani}}{\text{Total rumah tidak layak huni}} \times 100$

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN
Terwujudkan perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas	Presentase kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan	Terwujudnya lingkungan permukiman yang berkualitas	Luasan kawasan tidak kumuh	Hektar	<i>Luasan Kawasan yang tidak kumuh perkotaan</i>
		Terlayannya air bersih	Cakupan layanan air bersih	Persen	$\frac{\text{Jumlah rumah yang terakses air bersih}}{\text{Total rumah}} \times 100$
		Terlayannya sanitasi masyarakat	Cakupan layanan sanitasi	Persen	$\frac{\text{Jumlah rumah yang terakses sanitasi}}{\text{Total rumah}} \times 100$
Terwujudnya legalitas dan tertib pemanfaatan tanah	Persentase penyediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum	Meningkatnya kapasitas status dan pemanfaatan tanah	Persentase bidang tanah Pemda bersertifikat	Persen	$\frac{\text{Jumlah tanah pemda bersertifikat}}{\text{jumlah tanah pemda}} \times 100$
			Persentase luas tanah Pemda yang dimanfaatkan	Persen	$\frac{\text{Jumlah tanah pemda yang dimanfaatkan}}{\text{jumlah tanah pemda}} \times 100$

## 12. DINAS LINGKUNGAN HIDUP

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN
Mempertahankan kelestarian fungsi lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Terkendalinya pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup	Pencemaran Emisi Gas Rumah Kaca	Persen	$\frac{\text{Pelaksana Mitigas}}{\text{Target Mitigasi}} \times 100$

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN
		Meningkatnya kualitas pengurangan dan penanganan sampah	Persentase pengurangan timbulan sampah	Persen	$\frac{\text{Volume sampah yang dikurangi}}{\text{volume timbulan sampah}} \times 100$
			Persentase penanganan timbulan sampah	persen	$\frac{\text{Volume sampah yang ditangani}}{\text{volume timbulan sampah}} \times 100$
		Meningkatnya luasan Ruang Terbuka Hijau publik	Persentase Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik	Persen	$\frac{\text{Luas RTH}}{\text{Luas wilayah Kota}} \times 100$

### 13. DINPENDUKCAPIL

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN
Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.	Cakupan Layanan Adminitrasi Kependudukan	Optimalnya pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil.	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan	Persen	$KK = \frac{\text{Jumlah Kepala Keluarga yang memiliki KK}}{\text{Jumlah Kepala Keluarga}} \times 100$ $KTP = \frac{\text{Jumlah Penduduk yang memiliki KTP}}{\text{Jumlah Penduduk Wajib KTP}} \times 100$ $Akta = \frac{\text{Jumlah Penduduk yang memiliki Akta Kelahiran}}{\text{Jumlah Penduduk Pubalingga}} \times 100$

## 14. DINPERMASDES

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN
Meningkatnya Kualitas Pemerintahan, Kelembagaan dan Masyarakat Desa	Persentase Desa Swasembada	Meningkatnya perkembangan dan klasifikasi status kemajuan desa	Jumlah Desa Swasembada	desa	<i>Jumlah Desa Swasembada</i>
			Jumlah Desa Swakarya	desa	<i>Jumlah Desa Swakarya</i>
			Jumlah Desa Swadaya	desa	<i>Jumlah Desa Swadaya</i>

## 15. DINNAKER

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN
Menurunnya pengangguran terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	Meningkatnya Kesempatan Kerja yang Layak dan Terlindungi Jaminan Sosial	Cakupan pencari kerja yang ditempatkan	% (Persen)	$\frac{\text{Jumlah pencari kerja yang ditempatkan}}{\text{Jumlah pencari kerja terdaftar}} \times 100\%$
			Rasio tenaga kerja dengan Upah UMK	% (Persen)	$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja yg sesuai UMK}}{\text{Jumlah tenaga kerja}} \times 100\%$

## 16. DINAS PERHUBUNGAN

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN
Meningkatnya Keselamatan Lalu Lintas dan	Angka Kecelakaan	Tersedianya sarana dan prasarana perhubungan	Persentase pemenuhan fasilitas keselamatan lalu lintas	Persen	$\frac{\text{Perlengkapan jalan yang terpasang}}{\text{Kebutuhan perlengkapan jalan}} \times 100$

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN
Konektivitas antar wilayah			Persentase pemenuhan keselamatan angkutan jalan	Persen	$\frac{\text{Jumlah kendaraan bermotor wajib uji yang melaksanakan uji}}{\text{Jumlah Kendaraan motor wajib uji}} \times 100$

17. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN
Meningkatnya Keterbukaan, keamanan Informasi Publik dan data statistik daerah	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Meningkatnya Kualitas dan Keterbukaan Informasi Publik	Persentase PPID Perangkat Daerah yang sesuai regulasi	Persen	$\frac{\text{Jumlah PPID Perangkat daerah yang teregulasi}}{\text{Jumlah PPID Perangkat daerah}} \times 100 \%$
			Persentase tindak lanjut pengaduan dan aspirasi masyarakat	Persen	$\frac{\text{Jumlah pengaduan yang telah ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Pengaduan yang masuk}} \times 100\%$
		Meningkatnya ketersediaan Data Dasar dan data sektoral daerah	Data dasar dan sektoral Kabupaten	Persen	$\frac{\text{Jumlah Data yang terupload di Portal Satu Data Purbalingga}}{\text{Jumlah Data yang Seharusnya}} \times 100\%$
		Meningkatnya kinerja sistem persandian daerah	Persentase Pengamanan Informasi Daerah	Persen	$\frac{\text{Jumlah Informasi milik pemerintah yang diamankan}}{\text{Jumlah Informasi yang diterima dan dikirimkan}} \times 100\%$

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN
Meningkatnya Implementasi E- Government	Indeks SPBE	Meningkatnya cakupan infrastruktur jaringan TIK, dan sistem informasi terintegrasi	Rasio OPD Yang tercakup infrastruktur jaringan TIK	Persen	$\frac{\text{Jumlah OPD yang Tervercover Pengembangan dan Pemanfaatan Infrastruktur TIK}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$
			Persentase peningkatan sistem aplikasi informatika yang terintegrasi	Persen	$\frac{\text{Jumlah Aplikasi yang terintegrasi tahun (n)} - \text{Jumlah Aplikasi yang terintegrasi tahun (n-1)}}{\text{Jumlah Aplikasi yang terintegrasi tahun (n-1)}} \times 100\%$

18. DINAS KOPERASI DAN UKM

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN
Meningkatnya Kemandirian dan Daya Saing Koperasi dan Usaha Kecil Mikro	Kontribusi UMKM terhadap PDRB	Meningkatnya Budaya Berkoperasi dan Kualitas UKM	Prsrentase Peningkatan Koperasi Sehat	Persen	$\frac{\text{Jumlah koperasi sehat}}{\text{jumlah koperasi}} \times 100$
			Jumlah UKM Naik Kelas	Angka	<i>Jumlah usaha mikro menjadi usaha kecil</i>

## 19. DKPP

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN
Meningkatnya status pangan masyarakat	Skor PPH	Meningkatnya status pangan masyarakat	Angka kecukupan gizi	Angka	Skor PPH Kelompok Padi-padian, Umbi-umbian + lainnya
			Koefisien varian harga bahan pokok (beras)	Angka	$\frac{\text{Standar Deviasi (beras)}}{\text{Harga Rata - Rata (beras)}} \times 100$
Meningkatnya Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan	NTP Sektor Perikanan	Meningkatnya Daya Saing Sub Sektor Perikanan	Tingkat konsumsi ikan	Kg/kapita/th	$AKI = A + B + C$ <i>A = Konsumsi rumah tangga</i> <i>B = Konsumsi di luar rumah tangga</i> <i>C = Konsumsi tidak tercatat</i>

## 20. DPMPTSP

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN
Meningkatnya Realisasi Investasi	Realisasi Nilai Investasi Baru	Meningkatnya Iklim Investasi dan Pelayanan Perijinan	PMA dan PMDN yang beroperasi	Unit	<i>Jumlah PMA + Jumlah PMDN</i>



## 21. DINPORAPAR

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN
Meningkatnya kualitas kepemudaan dan olahraga	Prestasi pemuda dan prestasi olahraga skala nasional dan internasional dalam satu tahun	Meningkatnya prestasi pemuda dan Olah raga	Jumlah prestasi pemuda dan prestasi cabang olahraga dalam satu tahun	Medali / Piagam	jumlah perolehan medali/piagam (Tingkat Provinsi dan Nasional) dalam 1 tahun
Meningkatnya Pendapatan dari Sektor Pariwisata	Pendapatan Daerah dari sektor pariwisata	Meningkatnya kunjungan wisata	Kunjungan wisata	Wisatawan	Jumlah wisatawan

## 22. DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN
Meningkatnya penyelenggaraan kearsipan	Indeks kearsipan	Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan kearsipan	Cakupan OPD/ Ormas/ BUMD/ Lembaga Desa yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku	Persen	$\frac{\text{OPD, Ormas, BUMD, Lembaga Desa yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku}}{\text{Jumlah OPD, Ormas, BUMD, Lembaga Desa}} \times 100$
Meningkatnya pengetahuan dan literasi masyarakat	Persentase peningkatan budaya baca masyarakat	Meningkatnya budaya gemar membaca	Rasio perpustakaan	Rasio	$\frac{\text{Jumlah perpustakaan}}{\text{Jumlah penduduk Kab. Purbalingga}} \times 10.000$

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN
			Rasio Pengunjung perpustakaan	Rasio	$\frac{\text{Jumlah pengunjung perpustakaan}}{\text{Jumlah penduduk Kab. Purbalingga}} \times 10.000$

23. DINAS PERTANIAN

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN
Meningkatnya Kesejahteraan Pelaku Usaha Pertanian	NTP Sektor Pertanian	Meningkatnya Daya Saing Sub Sektor Pertanian	NTP per sub sektor		
			Tanaman Pangan	Persen	<i>Release BPS</i>
			Tanaman Hortikultura	persen	<i>Release BPS</i>
			Tanaman Perkebunan	Persen	<i>Release BPS</i>
			Peternakan	Persen	<i>Release BPS</i>

24. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN
Meningkatnya Daya Saing Industri dan Pelayanan Perdagangan	PDRB Sub sector industri	Meningkatnya Kualitas IKM	IKM Bersertifikat (%)	Angka	Jumlah IKM yang bersertifikat
			IKM berorientasi ekspor	Angka	<i>Jumlah IKM berorientasi ekspor</i>
	PDRB Subsektor Perdagangan	Meningkatnya Kualitas Sarpras Perdagangan	Jumlah Pasar Rakyat Bersih dan Sehat	Pasar	<i>Jumlah Pasar baik</i>
		Meningkatnya nilai ekspor	Nilai ekspor	Angka	<i>Nilai ekspor</i>

25. SATPOL PP

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN
Meningkatnya ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran	Meningkatnya pelayanan bencana kebakaran	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	persen	$\frac{\text{jumlah Luas WMK}}{\text{jumlah luas potensi ancaman kebakaran}} \times 100$

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN
Mewujudkan peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan Keamanan dalam masyarakat.	Angka Pelanggaran Ketertiban Umum per 10.000 penduduk	Meningkatnya ketertiban, keamanan, dan perlindungan masyarakat	Persentase penurunan jumlah pelanggaran perda dan perkada	Persen	$\frac{\text{Jumlah Pelanggaran perda dan perkara tahun } n - \text{jumlah pelanggaran perda dan perkara tahun } n - 1}{\text{jumlah pelanggaran perda dan perkara tahun } n} \times 100$
			Rasio petugas perlindungan masyarakat di Kabupaten / Kota	Angka	$\frac{100 \text{ orang petugas Linmas}}{\text{Wilayah Kerja}}$
	Angka Kriminalitas	Meningkatnya ketertiban, keamanan, dan perlindungan masyarakat	Persentase penurunan jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	$\frac{\text{jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum tahun } n - \text{jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum tahun } n - 1}{\text{jumlah pelanggaran perda tahun } n} \times 100$

26. Pelaksana BPBD

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN
Meningkatnya ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana	Indeks ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana	Menurunnya Indeks resiko bencana alam	Cakupan pelayanan bencana alam	%	$\frac{\text{Jumlah Kejadian Bencana yang ditangani}}{\text{Jumlah Kejadian Bencana}} \times 100$
			Cakupan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana alam	%	$\frac{\text{Jumlah desa dan kel tanggap bencana}}{\text{Jumlah desa dan kel rawan bencana}} \times 100$

## 27. KANTOR KESBANGPOL

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN
Mewujudkan peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan Keamanan dalam masyarakat.	Indeks Toleransi	Meningkatnya ketertiban, keamanan, dan perlindungan masyarakat	Angka Konflik Poleksosbud dan SARA per 10.000 penduduk	Nilai	<i>Nilai rata-rata persentase potensi konflik agama, gangguan keamanan dari kelompok radikal dan konflik sosial yang tertangani</i>
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berdemokrasi	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum (Pemilukada, Pemilu, Pilpres)	Meningkatnya demokrasi yang sehat dan partisipasi politik masyarakat	Persentase pemilih dalam pemilu	Persen	$\frac{\text{Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih}}{\text{Jumlah Pemilih Terdaftar}} \times 100$

BUPATI PURBALINGGA,

DYAH HAYUNING PRATIWI